

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Reputasi Sekolah

1. Pengertian Reputasi Sekolah

Reputasi dalam bahasa Inggris disebut *reputation* dan kerap diterjemahkan “nama baik”. Secara umum berasal dari bahasa Latin yakni *re* yang berarti berulang-ulang dan *putare* yang berarti menilai atau menghitung. Menurut Harton, *reputare* artinya memikirkan kembali secara baik-baik, matang, dan berulang-ulang atau “*to think over*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reputasi diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya sebagai sebab mendapat nama baik.¹² Menurut Waska Warta, reputasi adalah pengakuan akan nama baik yang timbul karena penilaian, kepercayaan, dan pandangan umum secara meluas bahwa seseorang atau suatu subjek memiliki kualitas, karakter yang kuat, dan kemampuan tertentu yang dilihat, teruji, dapat dirasakan, serta diakui masyarakat atau para pemangku kepentingan (*stakeholder*).¹³

Menurut Corft dan Dalton, reputasi adalah keseluruhan nilai-nilai yang oleh para pemangku kepentingan disandangkan dan disematkan kepada organisasi berdasarkan persepsi dan interpretasi mereka atas citra yang dikomunikasikan organisasi secara terus menerus. Sedangkan menurut Davis dalam Asri yang menyatakan, reputasi merupakan istilah kolektif yang

¹² Warta, *Manajemen Reputasi*, 12.

¹³ *Ibid.*, 13.

merujuk pada semua pandangan orang lain mengenai reputasi organisasi yang didalamnya mencakup identitas dan citra.¹⁴

Reputasi yang baik akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi organisasi/lembaga pendidikan sebaliknya reputasi yang buruk dapat menjatuhkan sebuah organisasi/lembaga pendidikan. Kemudian reputasi sekolah biasanya menjadi daya tarik utama bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang diinginkan. Reputasi menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesuksesan, dan prestasi sekolah merupakan tanda seberapa baik program sekolah bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah reputasi bagi sekolah.¹⁵

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa reputasi sekolah adalah serangkaian opini, persepsi, serta perilaku atas setiap individu dalam suatu lembaga pendidikan yang berkaitan dengan performa lembaga pendidikan.

2. Faktor-Faktor Pembangun Reputasi Sekolah

Dalam membangun sebuah reputasi sekolah tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. faktor merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam pembentukan sesuatu. Unsur-unsur yang membentuk reputasi organisasi/lembaga pendidikan dikenal sebagai faktor pembangun reputasi. Faktor pembangun reputasi sangat penting untuk membangun dan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Anggoro Prasetyo, "Strategi Humas Dalam Membangun Reputasi Sekolah di SMAN 3 Tualang Kabupaten Siak," 2022.

membentuk reputasi suatu organisasi/lembaga pendidikan. Menurut Trimahan ada empat faktor pembangun reputasi sebagai berikut:¹⁶

a. Kredibilitas

Kredibilitas yaitu nama baik yang harus dijaga. Suatu organisasi/lembaga pendidikan dalam membangun reputasi harus menjaga dan mempertahankan nama baiknya, sehingga kredibilitas organisasi/lembaga pendidikan di mata masyarakat menjadi baik. Kredibilitas sekolah merujuk pada tingkat kepercayaan dan reputasi yang dimiliki oleh sebuah sekolah atau madrasah di mata masyarakat, termasuk siswa, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kredibilitas sekolah didasarkan pada kualitas pendidikan yang diberikan yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kualitas sebuah sekolah. Semakin tinggi kredibilitas sebuah sekolah, semakin banyak orang yang memandangnya sebagai lembaga pendidikan yang dapat diandalkan dan berkualitas. Kredibilitas sekolah dapat berdampak pada jumlah siswa yang mendaftar, tingkat kepercayaan masyarakat, dan juga dukungan finansial yang diterima oleh sekolah dari pihak-pihak terkait.

b. Kepercayaan Publik

Membangun kepercayaan pada publik tidak mudah. Jika suatu organisasi/lembaga pendidikan sudah mendapatkan kepercayaan dari publik kemudian organisasi/lembaga pendidikan tersebut mengecewakan publiknya, maka publik tidak mudah untuk percaya lagi pada organisasi/lembaga pendidikan tersebut. Dalam membangun kepercayaan

¹⁶ Irwan Dwi Prasetyo, “Aktivitas Humas Dalam Upaya Meningkatkan Reputasi Sekolah (Studi Di SMKN 3 Pekanbaru)” (Universitas Islam Riau, 2018), 24–26.

tersebut kembali akan sangat sulit, untuk itu organisasi/lembaga pendidikan harus menjaga kepercayaan publiknya. Dengan mempertahankan dan menjaga kepercayaan publiknya maka organisasi/lembaga pendidikan tersebut dipandang baik oleh publiknya dan publik akan mempercayai organisasi/lembaga pendidikan tersebut.

c. Tanggung Jawab

Setiap organisasi/lembaga pendidikan harus mempunyai tanggung jawab atas tugas yang dilaksanakannya, sehingga pekerjaan tersebut dapat sesuai dan tepat waktu dengan apa yang sudah diharapkan serta tujuan organisasi/lembaga pendidikan dapat tercapai.

d. Kehandalan Personel Sekolah

Kehandalan sangat diperlukan bagi organisasi/lembaga pendidikan untuk membangun suatu reputasi. Dengan adanya kehandalan artinya organisasi/lembaga pendidikan memerlukan tenaga kerja yang profesional dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan bidang masing-masing. Sehingga segala sesuatu dapat diselesaikan dengan tepat dan benar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dalam membangun sebuah reputasi meliputi kredibilitas organisasi/lembaga pendidikan yang harus dijaga nama baiknya sehingga kredibilitas organisasi/lembaga pendidikan di mata masyarakat menjadi baik. Dengan nama baik tersebut akan terbentuk citra kemudian dapat membentuk reputasi. Kepercayaan publik sangat diperlukan karena dengan publik percaya pada organisasi/lembaga pendidikan tersebut maka akan dipandang

baik. Tanggung jawab suatu organisasi/lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam melakukan tugas-tugasnya sehingga pandangan masyarakat akan baik terhadap organisasi/lembaga pendidikan yang bertanggung jawab. Kehandalan personel sekolah sangat diperlukan bagi organisasi/lembaga pendidikan, dengan kehandalan yang dimiliki maka efektivitas dan efisiensi organisasi dapat tercapai.¹⁷

3. Proses Pembentukan Reputasi Sekolah

Proses pembentukan reputasi membutuhkan waktu yang lebih lama dari proses pembentukan citra.¹⁸ Reputasi adalah aset lembaga yang strategis. Menurut Paul Argenti yang dikutip Prajudi menyatakan bahwa reputasi dapat terbentuk ketika ada kesesuaian antara citra (*image*) yang terbentuk dengan identitas (*identity*) yang dibangun perusahaan. Identitas perusahaan merupakan manifestasi visual realitas perusahaan yang disampaikan melalui nama, logo, moto, produk, pelayanan, pembangunan, alat kantor, seragam dan bentuk fisik lainnya yang diciptakan oleh organisasi dan dikomunikasikan kepada seluruh publiknya.¹⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan reputasi sekolah yakni ketika ada kesesuaian antara citra yang terbentuk dengan identitas yang dibangun lembaga pendidikan. Identitas lembaga pendidikan merupakan manifestasi visual realitas lembaga pendidikan yang disampaikan melalui nama, logo, visi, misi, produk, pelayanan, bangunan, alat pada lembaga pendidikan, seragam dan bentuk

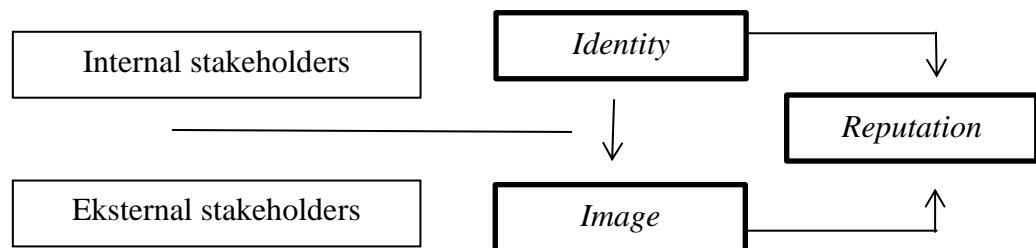
¹⁷ Ibid., 26.

¹⁸ Warta, *Manajemen Reputasi*, 14.

¹⁹ Prasetyo, "Aktivitas Humas Dalam Upaya Meningkatkan Reputasi Sekolah (Studi Di SMKN 3 Pekanbaru)," 26.

fisik lainnya yang diciptakan oleh lembaga pendidikan dan di komunikasikan kepada seluruh publiknya (orang tua siswa/ orang tua mahasiswa, masyarakat, dan instansi terkait). Menurut Eka, reputasi sekolah merupakan representasi dari persepsi tindakan sekolah masa lalu dan prospek masa depan yang menggambarkan keadaan sekolah yang secara keseluruhan menarik bagi semua stakeholder utamanya bila dibandingkan dengan pesaing utamanya (sekolah lain).²⁰

Membangun dan menjaga reputasi sekolah sebagai aset penting sekolah merupakan tugas humas. Selain itu, peran humas adalah memastikan organisasi memperoleh penilaian yang baik untuk apa yang dilakukannya. Proses pembentukan reputasi dapat dilihat dari bagan berikut:²¹



Sumber : (Prajudi, 2008: 7)

Bagan tersebut mengambil teori dari Karakose yang dikutip prajudi, reputasi di bentuk atas dasar 2 elemen, yaitu *identity* dan *image*. *Identity* menjelaskan bagaimana organisasi diterima dalam kalangan stakeholders internal sedangkan *image* menggambarkan persepsi stakeholders eksternal.²²

²⁰ Ibid., 27.

²¹ Ibid., 24.

²² Ibid., 23.

4. Cakupan Reputasi

a. Citra (*Image*)

Menurut Frank Jefkins menyatakan bahwa citra adalah suatu persepsi, ilustrasi, atau kesan akurat (sesuatu dengan kenyataan yang sebenarnya) mengenai keberadannya, berbagai kebijakan personalia, barang atau jasa dari suatu organisasi atau perusahaan. Rosady Ruslan berpendapat bahwa, citra ialah bentuk pelayanan jasa dan lain sebagainya yang hendak dicapai oleh humas dalam sistem informasi yang terbuka pada era globalisasi serba kompetitif tersebut, intinya tidak terlepas dari bentuk kualitas pelayanan yang telah diberikan, nilai kepercayaan merupakan amanah dari publiknya serta kemauan baik yang ditampilkan oleh perusahaan/lembaga yang bersangkutan. Menurut Argenti yang dikutip prajudi, citra merupakan sebuah fungsi bagaimana publik perusahaan memandang organisasi berdasarkan pada semua pesan yang dikirim perusahaan melalui nama, logo, presentasi diri, termasuk pernyataan dari visi perusahaan.²³

Menurut Frank Jefkins dalam Rosady Ruslan ada beberapa jenis citra antara lain sebagai berikut:²⁴

1) Citra Cermin (*Mirror Image*)

Citra yang dianut atau diyakini oleh publik internal, khususnya pimpinan yang selalu merasa dalam keadaan baik tanpa mempedulikan kesan dari pihak luar, dikenal dengan istilah *mirror image* atau lebih umum disebut dengan citra cermin. Citra cermin

²³ Ibid., 27–28.

²⁴ Ibid., 28–31.

tidak selalu tepat antara kenyataan di lapangan dengan citra yang diharapkan, bahkan seringkali justru mencerminkan dan menonjolkan *negative image*. Hal ini terjadi sebagai akibat dari akses publik internal yang kurang memadai terhadap informasi, pengetahuan, dan pemahaman atas pendapat dan cara pandang publik eksternal.

2) Citra Kini (*Current Image*)

Citra kini adalah citra yang ada dan berlaku pada pihak-pihak eksternal. Citra ini semata-mata terbentuk karena pengalaman atau informasi orang luar yang kurang memadai dan citra yang ditampilkan pun cenderung bersifat negatif bahkan pada posisi tersebut *public relations* kerap kali dihadapkan pada resiko yang lebih mengarah pada permusuhan, kecurigaan, prasangka buruk hingga muncul kesalahpahaman.

3) Citra Keinginan (*Wish Image*)

Citra keinginan bisa disebut sebagai citra harapan, yakni citra yang ditampilkan selalu terlihat lebih baik, menyenangkan dan diterima dengan kesan yang selalu positif yang diberikan oleh publik dan tentunya inilah citra yang diimpikan oleh manajemen bagi perusahaan. Citra yang dimaksudkan ini biasanya dirumuskan untuk menyambut sesuatu yang baru yaitu publik yang belum mengetahui informasi mengenai perusahaan.

4) Citra Perusahaan (*Corporate Image*)

Citra ini berkaitan dengan sosok asli perusahaan sebagai tujuan utamanya, bagaimana membangun citra perusahaan yang positif agar

lebih dikenal dan disukai publiknya baik dari sejarahnya, kualitas pelayanan primanya, keberhasilan dalam industri pemasaran dan faktor lainnya. Dalam hal ini, pihak humas berupaya atau bahkan ikut bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga reputasi perusahaan agar berdampak pada harga saham yang harus tetap terjaga nilainya agar dapat bersaing di pasar.

5) Citra Serbaneka (*Multiple Image*)

Citra serbaneka merupakan pelengkap dari citra perusahaan lain yang telah disebutkan di atas, misalnya mengenai bagaimana *Public Relations* mengenali identitas perusahaan seperti seragam, atribut logo, *brand's name*, sosok gedung dan lain sebagainya. semua hal tersebut kemudian diidentifikasi menjadi citra serbaneka yang diintegrasikan ke dalam citra perusahaan.

6) Citra Penampilan (*Performance Image*)

Citra penampilan ini lebih terfokus kepada subyeknya, bagaimana kinerja atau penampilan para profesional di perusahaan yang bersangkutan.

Citra organisasi/lembaga dapat terwujud tergantung dari bagaimana cara organisasi/lembaga mengusahakannya seperti citra penampilan, organisasi/lembaga dapat mengaplikasikan bentuk dan kualitas pelayanannya dengan lebih baik lagi kedepannya. Penilaian masyarakat terhadap citra organisasi/lembaga yang diwakili oleh pihak humas dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, kesan baik dan biasanya

berlandaskan pada nilai-nilai kepercayaan yang merupakan pandangan/persepsi dari publik terhadap organisasi/lembaga tersebut.

b. Identitas (*Identity*)

Menurut M. Linggar Anggoro, identitas perusahaan merupakan suatu metode yang memungkinkan suatu perusahaan dikenal dan dibedakan dari perusahaan lainnya. Menurut Argenti yang dikutip prayudi mengartikan identitas perusahaan adalah manifestasi visual realitas perusahaan yang disampaikan melalui nama, logo, moto, produk, pelayanan, bangunan, alat kantor, seragam dan bentuk fisik lainnya yang diciptakan oleh organisasi dan dikomunikasikan kepada seluruh publiknya.²⁵

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa identitas lembaga pendidikan adalah suatu cara atau hal yang membuat suatu sekolah dapat dikenal dan dibedakan dengan sekolah lain yang disampaikan melalui nama, logo, visi, misi, pelayanan, bangunan, alat kantor, seragam, dan bentuk fisik lainnya yang dikomunikasikan kepada seluruh publiknya baik internal maupun eksternal.²⁶ Menurut Albert dan Whetten ada tiga unsur pembentukan identitas yaitu:²⁷

1) Fundamental

Organisasi atau perusahaan memahami bahwa fungsi utama dalam bisnis yaitu mengantarkan nilai yang dapat memuaskan stakeholders.

²⁵ Ibid., 31.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 32.

2) Unik

Hal ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk membangun kekhasan organisasinya agar berbeda dengan pesaingnya.

3) Konsisten

Kemampuan organisasi mempertahankan atribut-atribut khasnya secara berkesinambungan mulai sejak beroperasi hingga bertahannya organisasi tersebut melayani pasar. Untuk membangun identitas yang konsisten semua pihak mulai dari pimpinan, karyawan, konsumen, investor, dan masyarakat mempunyai persepsi yang sama atas ciri-ciri khas perusahaan tersebut.

B. Program Adiwiyata

1. Pengertian Program Adiwiyata

Program adiwiyata merupakan salah satu bentuk penerapan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) secara nyata di lingkungan pendidikan. Secara harfiah, kata “Adiwiyata” diambil dari bahasa sanskerta yaitu *Adi* dan *Wiyata*. Kata *Adi* yang berarti besar, baik, agung, ideal dan sempurna. Kemudian kata *Wiyata* yang berarti tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan, norma, dan etika dalam kehidupan sosial.²⁸ Dengan demikian, Adiwiyata dapat diartikan sebagai tempat yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai

²⁸ Saeful Uyun et al., *Manajemen Sekolah: Madrasah Adiwiyata*, 1st ed. (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 9.

norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan.²⁹

Program adiwiyata merupakan suatu kegiatan yang dibuat dalam upaya mendayagunakan lingkungan sekitar dilakukan dengan cara yang baik. Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah/madrasah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah/madrasah yang turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup. Kegiatan utama program adiwiyata ini adalah mewujudkan kelembagaan sekolah/madrasah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Dengan program adiwiyata diharapkan setiap perkembangan ilmu pengetahuan dapat mengubah pola pikir generasi terhadap pentingnya keseimbangan lingkungan. Jika generasi memahami konsep keseimbangan lingkungan maka besar kemungkinan akan tercipta calon-calon pemimpin masa depan yang mengerti dan melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan.³⁰

Adapun tujuan dari pelaksanaan program adiwiyata antara lain mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara garis besar, tujuan ini dari program adiwiyata adalah memberikan pemahaman terhadap seluruh komponen sekolah tentang pendidikan lingkungan hidup tentunya

²⁹ Makmur Syukri, *Manajemen Adiwiyata (Implementasi dan Upaya Pengembangan Menuju Sekolah/Madrasah Paripurna)*, 1st ed. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), 7.

³⁰ Syoffnelli, Zulfan Saam, and Thamrin, "Pengaruh Program Adiwiyata Terhadap Pengetahuan Perilaku dan Keterampilan Siswa dan Guru dalam Mengelola Lingkungan pada SMK di Kabupaten Pelalawan," *Dinamika Lingkungan Indonesia* 3, no. 1 (January 16, 2016): 17.

untuk direalisasikan di lingkungan sekolah sehingga mendapatkan banyak manfaat mulai dari hal kecil seperti kenyamanan lingkungan sekolah.³¹

2. Prinsip-Prinsip Dasar Program Adiwiyata

Prinsip sangatlah diperlukan di dalam pelaksanaan program adiwiyata, karena dengan adanya prinsip dasar program ini bisa berjalan maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya. Menurut Makmur Syukri, pelaksanaan program adiwiyata diletakkan pada dua prinsip dasar berikut ini:³²

a. Partisipatif

Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Keterlibatan warga sekolah tanpa kecuali dalam implementasi program adiwiyata menjadi point penting guna mensukseskan program tersebut. Warga sekolah dalam hal ini adalah seluruh komponen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, pegawai, karyawan dituntut berperan aktif dalam menciptakan budaya peduli terhadap lingkungan.

b. Berkelanjutan

Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara komprehensif. Untuk memastikan bahwa program dapat berlanjut perlu adanya monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dari setiap tahap/proses yang dijalankan. Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi akan diperoleh gambaran

³¹ Mohammad Dendy Fathurahman Bahrudin, "Pelaksanaan Program Adiwiyata Dalam Mendukung Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Di SMA Negeri 4 Padeglang," *Jurnal Pendidikan Geografi* 17, no. 1 (2017): 29–30.

³² Syukri, *Manajemen Adiwiyata (Implementasi dan Upaya Pengembangan Menuju Sekolah/Madrasah Paripurna)*, 9.

penilaian mengenai pelaksanaan program adiwiyata, serta diharapkan muncul masukan dan saran untuk perbaikan kelanjutan program kedepannya.

Sekolah yang melaksanakan program adiwiyata harus merencanakan kegiatan yang mendukung terlaksananya program sekaligus mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing. Kegiatan yang direncanakan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus secara menyeluruh.

3. Komponen dan Standar Program Adiwiyata

Dalam menjalankan dan melaksanakan program adiwiyata, setidaknya ada empat hal pokok yang harus diperhatikan, diantaranya:

a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan maka diperlukan penetapan kebijakan sekolah yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar program adiwiyata. Pengembangan kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pengembangan kurikulum sekolah adiwiyata meliputi kebijakan pengembangan visi, misi, dan tujuan sekolah yang memuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan pengembangan struktur kurikulum sekolah yang memuat pengembangan materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup, serta kebijakan ketetapan ketuntasan minimal belajar pada masing-masing kelompok mata pelajaran.

2) Kebijakan pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³³

b. Kurikulum Berbasis Lingkungan

Kurikulum adalah sebuah rencana pembelajaran yang terdiri dari dua unsur yaitu visi dan struktur. Kurikulum menjadi alat penting untuk melaksanakan pembelajaran. Kurikulum mencakup segala sesuatu yang benar-benar terjadi dalam proses pendidikan yang merupakan pengalaman belajar siswa.³⁴

Kurikulum berbasis lingkungan dapat di implementasikan dengan menyampaikan materi lingkungan hidup melalui kurikulum yang bervariasi untuk memberikan pemahaman tentang lingkungan hidup yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap peduli lingkungan. Pendidikan lingkungan memainkan peranan yang penting sebagai pembentuk dan penyebar nilai-nilai peduli lingkungan, sehingga tercapai keselarasan dengan lingkungan.³⁵

Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan dibagi dalam tiga indikator yaitu produksi karya nyata terkait dengan pelestarian lingkungan, menerapkan pengetahuan lingkungan hidup yang diperoleh untuk memecahkan masalah lingkungan, dan mengkomunikasikan

³³ Ibid., 17–18.

³⁴ Siti Syarifah, “Manajemen Sekolah Adiwiyata Dalam Mengembangkan Karakter Peduli Lingkungan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Situbondo Tahun Pelajaran 2021/2022,” *Universitas Islam Negeri Kyai Ahmad Siddiq Jember*, Skripsi, Oktober 2022, 39–40.

³⁵ Ibid., 40.

pembelajaran lingkungan dalam berbagai cara dan media.³⁶ Indikator pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan meliputi:³⁷

- 1) Penerapan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran aktif yang melibatkan siswa atau bisa juga dengan berkomunikasi dengan mempelajari lingkungan dalam berbagai cara dan sarana.
- 2) Pengembangan isu lokal atau global yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
- 3) Buat rencana pembelajaran yang lengkap mengenai kegiatan pembelajaran didalam maupun di luar kelas.
- 4) Mengkomunikasikan hasil inovasi pendidikan lingkungan hidup.
- 5) Menghubungkan pengetahuan konseptual dengan prosedural dalam memecahkan masalah lingkungan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Menghasilkan karya nyata yang berhubungan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

c. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif

Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif adalah kegiatan yang melibatkan warga sekolah dan masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan yang memberikan manfaat baik bagi warga sekolah, masyarakat

³⁶ Anisa Irlansari and Puji Hardati, "Pelaksanaan Program Adiwiyata Berdasarkan Komponen Berbasis Lingkungan," *Edu Geography* 7(3) (2019): 214.

³⁷ Syarifah, "Manajemen Sekolah Adiwiyata Dalam Mengembangkan Karakter Peduli Lingkungan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Situbondo Tahun Pelajaran 2021/2022," 40–41.

maupun lingkungan sekitar dalam rangka kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.³⁸

Untuk menciptakan sekolah yang sadar lingkungan, warga sekolah harus terlibat dalam kegiatan pembelajaran lingkungan sekitar, melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi warga sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Aksi yang dapat dilakukan oleh warga sekolah dalam pengembangan kegiatan lingkungan dengan partisipatif diantaranya:

- 1) Pemeliharaan lingkungan sekolah.
- 2) Pemanfaatan lahan dan fasilitas sekolah.
- 3) Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbudaya lingkungan.
- 4) Pengembangan kreativitas dan inovasi peserta didik.
- 5) Menjalin kemitraan dengan melibatkan pihak dari luar sekolah seperti orang tua, alumni, media, pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan sekolah lain untuk memperkuat upaya melindungi dan mengelola lingkungan.
- 6) Membangun jaringan dukungan pembelajaran lingkungan hidup, dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan peran komite sekolah dalam pembelajaran lingkungan hidup, dan menjadi narasumber dalam rangka pembelajaran lingkungan hidup.³⁹

³⁸ Angga Swasdita Fridantara, "Implementasi Program Adiwiyata Di SMA Negeri 2 Klaten," *Universitas Negeri Yogyakarta*, Skripsi, 2015.

³⁹ Syukri, *Manajemen Adiwiyata (Implementasi dan Upaya Pengembangan Menuju Sekolah/Madrasah Paripurna)*, 36.

d. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan

Sarana pendukung sekolah merupakan elemen yang penting untuk menunjang terciptanya penyelenggaraan yang baik dan efektif. Manajemen dan pengembangan fasilitas mencakup pengembangan fungsional struktur pendukung sekolah untuk pendidikan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan secara internal maupun eksternal, hemat air, listrik, dan perlengkapan kantor serta meningkatkan kualitas layanan makanan sehat dan mengembangkan sistem pengelolaan limbah. Indikator pengelolaan sarana pendukung sekolah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan sarana ramah lingkungan, meliputi sarana air bersih, tempat sampah, air limbah dan saluran drainase, serta ruang terbuka hijau.
- 2) Penyediaan sarana pembelajaran lingkungan hidup, meliputi sarana pembuatan kompos, sarana sumur resapan dan biopori, dan sarana biogas.
- 3) Peningkatan mutu sarana ramah lingkungan.
- 4) Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan sarana ramah lingkungan.
- 5) Dukungan pembelajaran lingkungan hidup, meliputi pelatihan pembuatan biopori, pelatihan pengelolaan sampah, dan pelatihan pertanian organik.⁴⁰

Tujuan pengelolaan sarana prasarana sekolah yaitu agar tercipta fasilitas belajar yang siap pakai dan memadai sehingga peserta didik

⁴⁰ Syarifah, "Manajemen Sekolah Adiwiyata Dalam Mengembangkan Karakter Peduli Lingkungan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Situbondo Tahun Pelajaran 2021/2022," 43–44.

dapat belajar dengan efektif.⁴¹ Menurut Kementerian Lingkungan, ada dua standar dalam pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Pertama, ketersediaan sarana prasarana pendukung ramah lingkungan. Kedua, peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan di sekolah.

4. Perencanaan Program Adiwiyata

Program adiwiyata merupakan program yang menyatu dalam 8 Standar Nasional Pendidikan sehingga pada proses pelaksanaannya tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tujuan utama dari program adalah menumbuhkan budaya peduli lingkungan bagi warga sekolah khususnya peserta didik. Untuk mencapai program tersebut dibutuhkan proses manajemen yang tertata dengan rapi.

Secara operasional, untuk menjadi sekolah adiwiyata diharapkan melalui proses yang tersusun secara hirarki menjadi lima langkah yaitu membentuk tim adiwiyata sekolah, menyusun kajian lingkungan sekolah, menyusun rencana aksi lingkungan sekolah, melaksanakan kegiatan aksi lingkungan, evaluasi dan monitoring.⁴²

a. Membentuk Tim Adiwiyata Sekolah

Langkah awal yang harus dilakukan untuk mewujudkan adiwiyata adalah membentuk tim adiwiyata sekolah. Tim adiwiyata inilah yang nantinya akan mengkoordinir dan merumuskan kajian dan

⁴¹ Risky Novitantia, "Evaluasi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Ramah Lingkungan Pada Program Adiwiyata Di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta," *Hanata Widya* 5(5) (2016).

⁴² Syukri, *Manajemen Adiwiyata (Implementasi dan Upaya Pengembangan Menuju Sekolah/Madrasah Paripurna)*, 53.

aksi lingkungan di sekolah. Tim adiwiyata sekolah harus mengandung unsur kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga kependidikan (TU), siswa, orang tua siswa, pemerintah setempat (kelurahan, kecamatan), perguruan tinggi, masyarakat sekitar termasuk juga LSM.⁴³

b. Menyusun Kajian Lingkungan Sekolah

Langkah kedua yang harus dilakukan sekolah adalah menyusun kajian lingkungan. Pada tahap ini sekolah harus melakukan EDS (Evaluasi Diri Sekolah) terhadap kondisi sekolah. Penyusunan kajian lingkungan ini merupakan tahap merencanakan program apa yang akan dilakukan oleh sekolah nantinya. Penyusunan kajian lingkungan ini dilakukan untuk menentukan arah yang jelas terhadap pelaksanaan program adiwiyata. Penyusunan kajian lingkungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Tim harus memastikan bahwa seluruh anggota tim bekerja sama sebaik mungkin untuk melaksanakan kajian dan sebanyak mungkin siswa berpartisipasi dalam proses ini.
- 2) Kajian lingkungan oleh tim sekolah dapat dilakukan melalui sebuah instrumen *checklist* mencakup berbagai isu lingkungan yang terjadi sekolah, seperti; sampah, air, energi, makanan dan kantin sekolah.
- 3) Dari isu lingkungan yang ada, sekolah dapat memfokuskan pada satu atau beberapa masalah yang akan ditetapkan menjadi fokus dalam melakukan rencana aksi lingkungan.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid., 54.

- 4) Kajian lingkungan dilakukan pada kurun waktu tertentu, misalnya dilakukan tahunan atau dua tahun sekali sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan kinerja tim sekolah.

c. Penyusunan Rencana Aksi Lingkungan

Rencana aksi lingkungan merupakan tindak lanjut dari penyusunan kajian lingkungan sekolah. Pada tahap ini sekolah menentukan kegiatan lingkungan yang akan dilakukan nantinya. Dalam menyusun rencana aksi lingkungan pihak sekolah harus mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah agar tujuan yang akan dicapai dapat terealisasi dengan baik. Rencana aksi lingkungan harus dideskripsikan ke dalam empat komponen program adiwiyata, yaitu komponen kebijakan, kurikulum, kegiatan partisipatif, dan sarana prasarana. Penyusunan rencana aksi lingkungan dapat dilakukan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Penyusunan rencana aksi berangkat dari hasil kajian lingkungan yang telah dilakukan.
- 2) Memilih topik yang sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan dan tenggat waktu yang dimiliki misalnya, sekolah ingin mengatasi permasalahan sampah sebagai kegiatan utama. Maka semua sumber daya yang dimiliki sekolah diarahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

⁴⁵ Ibid., 55.

- 3) Jika ada bagian yang tidak mampu diselesaikan oleh sekolah, maka perlu mencari cara bagaimana sekolah bekerja sama dengan pihak lain agar dapat mengatasinya. Misalnya permasalahan sampah maka bekerjasama dengan dinas kebersihan dalam mengangkut sampah ke TPA.
- 4) Menetapkan siapa yang akan menjadi penanggung jawab setiap kegiatan.
- 5) Melakukan perencanaan terhadap alokasi dana yang dibelanjakan untuk setiap aktivitas yang dilakukan.

d. Pelaksanaan Aksi Lingkungan

Setelah menyusun rencana aksi dan sudah tersusun dengan rapi maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan aksi. Pelaksanaan aksi lingkungan mengacu pada empat komponen dalam program adiwiyata yaitu pelaksanaan aksi lingkungan pada komponen kebijakan sekolah, kurikulum, kegiatan partisipatif, dan sarana prasarana.⁴⁶

Pelaksanaan aksi lingkungan harus dapat dibuktikan dengan dokumen yang valid seperti bukti perencanaan program, bukti daftar hadir dan berita acara, bukti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, bukti akta kerjasama, bukti hasil kegiatan siswa, dan bukti-bukti lainnya.⁴⁷

e. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan monitoring menjadi hal wajib dalam suatu proses pelaksanaan kegiatan. Proses evaluasi dan monitoring harus dilakukan

⁴⁶ Ibid., 56.

⁴⁷ Ibid., 56.

secara terus menerus untuk memaksimalkan implementasi kegiatan. Evaluasi dan monitoring dilakukan untuk mengetahui ketercapaian suatu program. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dapat dilakukan sendiri oleh pihak sekolah yang terbagi ke dalam evaluasi monitoring ketercapaian rencana aksi lingkungan dan evaluasi monitoring untuk mendapatkan penghargaan adiwiyata.⁴⁸

⁴⁸ Ibid., 57.